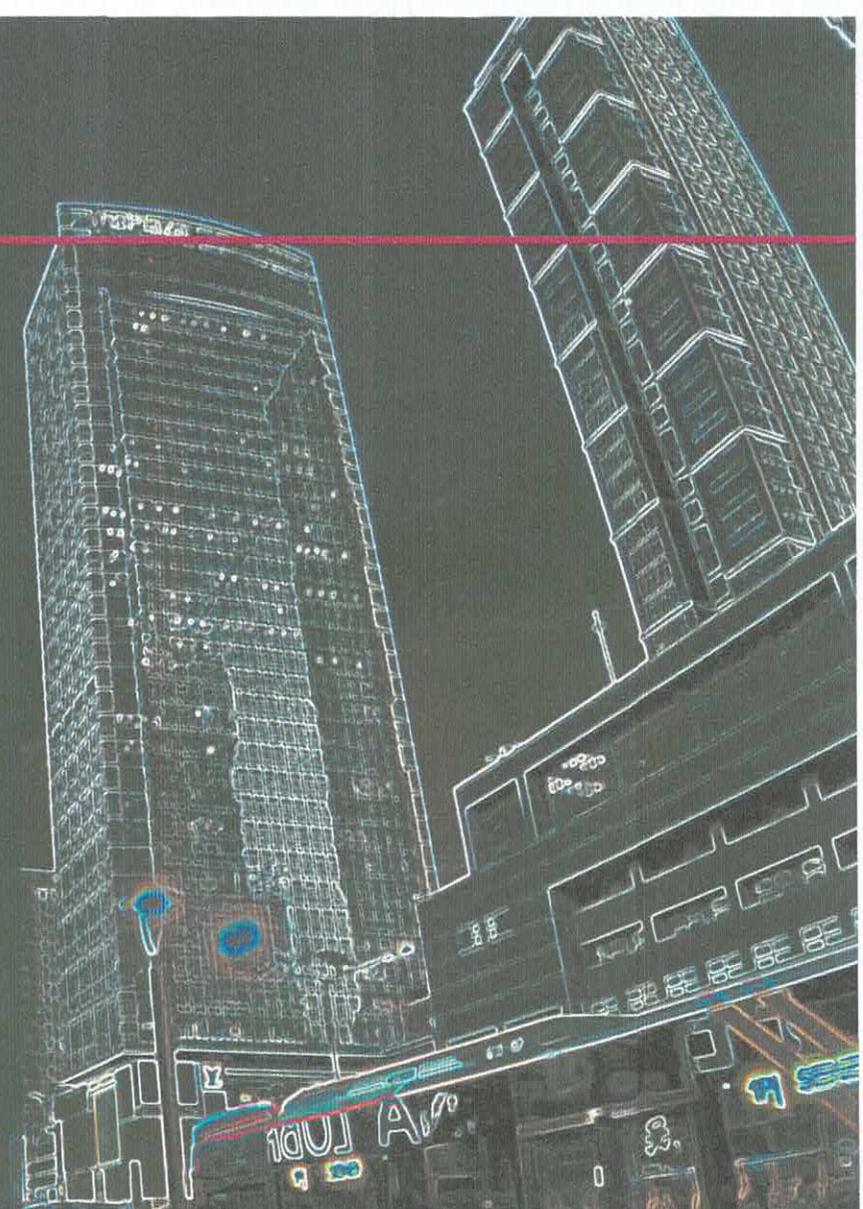




**BADAN
PENGELOLA
TRANSPORTASI
JABODETABEK**

Jl. MT Haryono Kav. 45 -46
Jakarta (12770)

Tlp. (021) 22791400
Email. bptj@dephub.go.id



**LAPORAN
KEUANGAN
TAHUNAN
TAHUN 2021
(AUDITED)**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan dan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 29 April 2022

Plt. Kepala Badan,

Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	5
I. LRA.....	7
I. NERACA.....	8
II. LAPORAN OPERASIONAL	9
III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
A. Penjelasan Umum.....	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
<i>Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 2020</i>	<i>24</i>
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	42
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	51
VI. LAMPIRAN	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan tanggung jawab UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 28 April 2022

Plt. Kepala Badan,



Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.509.311.770,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.509.311.770,00 atau mencapai 72,73 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp6.200.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp291.101.306.197,00 atau mencapai 99,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp293.757.346.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp599.695.945.509,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.525.550.255,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp462.639.043.792,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp133.531.351.462,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp599.695.945.509,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.306.244.500,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar

Rp209.032.533.401,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(205.726.288.901,00), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.203.067.270,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(221.274.661.831,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp534.164.854.395,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(221.274.661.831,00) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp(552.341.110,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp287.358.094.055,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp599.695.945.509,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LRA

**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21		% thd Angg	31-Dec-20
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.200.000.000	4.509.311.770	72,73	5.244.521.290
JUMLAH PENDAPATAN		6.200.000.000	4.509.311.770	72,73	5.244.521.290
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	23.406.154.000	23.122.286.036	98,79	20.005.809.019
Belanja Barang	B.4	105.026.415.000	103.322.091.271	98,38	81.295.122.626
Jumlah Belanja Operasi		128.432.569.000	126.444.377.307	98,45	101.300.931.645
Belanja Modal	B.5				
Belanja Tanah	B.5.1				-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	75.404.528.000	75.177.087.340	99,70	75.472.204.975
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	40.420.084.000	40.052.950.100	99,09	2.027.178.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.5.4				
Belanja Modal Lainnya	B.5.5	49.500.165.000	49.426.891.450	99,85	46.269.967.350
Jumlah Belanja Modal		165.324.777.000	164.656.928.890	99,60	123.769.350.325
JUMLAH BELANJA		293.757.346.000	291.101.306.197	99,10	225.070.281.970

Jakarta, April 2022
Plt. Kepala Badan,


Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si

II. NERACA

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	3.525.550.255	1.767.892.257
Persediaan Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		3.525.550.255	1.767.892.257
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	152.859.956.635	152.859.956.635
Tanah Belum Diregister		-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	270.591.771.847	225.297.943.070
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	189.506.674.143	149.304.046.043
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	27.437.061.023	26.827.564.023
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	47.148.750	47.148.750
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	- 177.803.568.606	(124.695.231.301)
Jumlah Aset Tetap		462.639.043.792	429.641.427.220
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	137.884.362.500	105.738.642.550
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	213.103.000	165.803.000
Aset Lainnya Belum Diregister		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	- 4.566.114.038	(3.148.910.632)
Jumlah Aset Lainnya		133.531.351.462	102.755.534.918
JUMLAH ASET		599.695.945.509	534.164.854.395
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	599.695.945.509	534.164.854.395
JUMLAH EKUITAS		599.695.945.509	534.164.854.395
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		599.695.945.509	534.164.854.395

Jakarta, April 2022
Rt. Kepala Badan,



Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.306.244.500	4.529.521.700
JUMLAH PENDAPATAN		3.306.244.500	4.529.521.700
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	23.122.286.036	20.005.809.019
Beban Persediaan	D.3	3.100.220.626	2.485.144.762
Beban Barang dan Jasa	D.4	88.593.420.903	65.455.296.358
Beban Pemeliharaan	D.5	19.064.384.459	14.394.674.743
Beban Perjalanan Dinas	D.6	20.507.724.143	21.340.615.898
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	54.644.497.234	46.084.086.568
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	1.312.000
Beban Lain-Lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		209.032.533.401	169.764.315.348
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(205.726.288.901)	(165.234.793.648)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		16.751.440.200	580.800
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(16.751.440.200)	(580.800)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.12	(16.751.440.200)	(580.800)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.203.067.270	749.010.045
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	99.593.576
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya	D.13	1.203.067.270	649.416.469
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(15.548.372.930)	648.835.669
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(221.274.661.831)	(164.585.957.979)
POS LUAR BIASA	D.14	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.15	(221.274.661.831)	164.585.957.979

Jakarta, April 2022
Plt. Kepala Badan,



Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	31-Dec-21	31-Dec-20
EKUITAS AWAL	534.164.854.395	478.925.051.694
SURPLUS/DEFISIT LO	- 221.274.661.831	- 164.585.957.979
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	- 2.310.000	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	- 550.031.110	-
KOREKSI LAIN-LAIN	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	287.358.094.055	219.825.760.680
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	65.531.091.114	55.239.802.701
EKUITAS AKHIR	599.695.945.509	534.164.854.395

Jakarta, April 2022
Pit. Kepala Badan,



Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek khususnya sampai dengan tahun 2024 adalah “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”. Pelayanan perhubungan yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek periode 31 Desember 2021 diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, yang mana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memiliki satu Satker dengan empat Pejabat Pembuat Komitmen

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Estimasi anggaran/target PNBPN TA 2021 semula sebesar Rp5.709.150.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp6.200.000.000,00 per 31 Desember 2021.

Selama periode berjalan telah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak empat belas kali dari DIPA awal, pagu awal belanja sebesar Rp350.587.093.000,00 setelah direvisi terakhir menjadi sebesar Rp293.757.346.000,00 sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2021

Uraian	ANGGARAN 2021	
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,709,150,000	6,200,000,000
Jumlah Pendapatan	5,709,150,000	6,200,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	25,189,700,000	23,406,154,000
Belanja Barang	124,176,848,000	105,026,415,000
Belanja Modal	201,220,545,000	165,324,777,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	350,587,093,000	293,757,346,000

Pada tahun 2021 DIPA awal BPTJ sebesar Rp350.587.093.000,00.

Pada bulan Januari 2021 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 yang bersumber dari realokasi antar unit eselon I di lingkungan kementerian (Ditjen KA) untuk penambahan anggaran untuk kegiatan pemberian layanan subsidi angkutan umum perkotaan dengan skema *Buy The Service* di wilayah Jabodetabek.

Sementara revisi DIPA lainnya merupakan pemotongan anggaran untuk *refocusing* dan realokasi belanja untuk prioritas kebutuhan dan penanggulangan dampak COVID-19.

*Realisasi
Pendapatan
Rp4.509.311.770,00*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.509.311.770,00 atau mencapai 72,73 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.200.000.000,00.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,200,000,000	4,509,311,770	72.73%
Jumlah	6,200,000,000	4,509,311,770	72.73%

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 14,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,509,311,770	5,244,521,290	-14.02
Jumlah	4,509,311,770	5,244,521,290	-14.02

*Realisasi
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp4.509.311.770,00*

B.1.1 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.509.311.770,00 dan Rp5.244.521.090,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami penurunan sebesar 14,02% dari TA 2020. Hal ini disebabkan menurunnya PNBPN dari perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek akibat menurunnya permintaan pengguna jasa angkutan akibat pandemi Covid-19.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Rincian Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	3,305,700,000	4,692,050,000	(1,386,350,000)	(29.55)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		8,128,500	(8,128,500)	(100.00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2,408,808	100	2,408,708	2,408,708.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	523,077,162	299,095,935	223,981,227	74.89
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	632,581,300	153,503,555	479,077,745	312.10
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	544,500	91,743,000	(91,198,500)	(99.41)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	45,000,000	-	45,000,000	-
Jumlah	4,509,311,770	5,244,521,090	- 735,209,320	(14.02)

Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya senilai Rp3.305.700.000,00 berasal dari PNBP Fungsional yaitu Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek beserta Penerbitan Kartu Pengawasan serta Jasa Rekomendasi Andalalin di Wilayah Jabodetabek

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp2.408.808,00.

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp523.077.162,00 berasal dari kelebihan pembayaran belanja barang TA 2020, dengan rincian penerimaan terlampir.

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp632.581.300,00 berasal dari kelebihan pembayaran belanja modal TA 2020, dengan rincian penerimaan terlampir.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp544.500,00 berasal dari pendapatan sewa rumah dinas atas aset rumah dinas Ditjen Perhubungan Udara dengan skema pembayaran dilakukan pemotongan secara otomatis pada SPM Gaji Pensiun pegawai. Pendapatan tersebut seharusnya masuk ke Satker Ditjen Perhubungan Udara tetapi karena yang bersangkutan pensiun di BPTJ sehingga pemotongan SPM atas sewa masuk sebagai PNBP pada Satker BPTJ.

Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp45.000.000,00 berasal dari kelebihan pembayaran belanja barang TA 2020 yang salah dalam menggunakan akun pendapatan seharusnya akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Setoran atas nama PT Candra Awe. Terhadap kesalahan kode akun dimaksud telah dilakukan ralat kode penerimaan PNBP ke KPPN Jakarta IV pada tanggal 22 Juli 2021.

Realisasi Belanja
Rp291.101.306.197,
00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp291.101.306.197,00 atau 99,10% dari anggaran belanja sebesar Rp293.757.346.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	23,406,154,000	23,122,286,036	98.79
Belanja Barang	105,026,415,000	103,322,091,271	98.38
Belanja Modal	165,324,777,000	164,656,928,890	99.60
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	293,757,346,000	291,101,306,197	99.10

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021



Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 29,34% di banding 31 Desember 2020. Perbandingan realisasi belanja sebagaimana berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	Rincian Realisasi Belanja		
	2021	2020	% naik/(turun)
Belanja Pegawai	23,122,286,036	20,005,809,019	15.58
Belanja Barang	103,322,091,271	81,295,122,626	27.10
Belanja Modal	164,656,928,890	123,769,350,325	33.04
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	291,101,306,197	225,070,281,970	29.34

Pada TA 2021, BPTJ menganggarkan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp4.678.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.363.561.733,00 atau 93,26 persen. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk penanganan COVID-19 untuk anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5=4/3	6
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	824,000,000	816,600,000	99.10	7,400,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	3,097,076,000	2,917,721,436	94.21	179,354,564
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	645,741,000	546,740,297	84.67	99,000,703
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	111,903,000	82,500,000	73.72	29,403,000
	JUMLAH	4,678,720,000	4,363,561,733	93.26	315,158,267

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp23.122.286.036
,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.122.286.036,00 dan Rp20.005.809.069,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai digunakan untuk memberikan gaji bulanan, Gaji ketiga belas, Gaji Keempat belas (tunjangan hari raya), uang lembur, uang makan dan tunjangan kinerja bulanan kepada 187 pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 15,58% dari TA 2020. Kenaikan belanja pegawai disebabkan bertambahnya jumlah pegawai di tahun 2021 dari 142 pegawai menjadi 187 pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	7,871,532,820	6,520,485,560	20.72
Belanja Pembulatan Gaji PNS	135,409	98,772	37.09
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	521,570,490	480,675,060	8.51
Belanja Tunj. Anak PNS	146,396,396	138,201,172	5.93
Belanja Tunj. Struktural PNS	679,380,000	725,130,000	- 6.31
Belanja Tunj. Fungsional PNS	43,550,000	19,790,000	120.06
Belanja Tunj. PPh PNS	34,190,311	35,032,386	- 2.40
Belanja Tunj. Beras PNS	476,161,500	346,095,180	37.58
Belanja Uang Makan PNS	1,222,859,000	1,194,178,000	2.40
Belanja Tunjangan Umum PNS	356,610,000	250,355,000	42.44
Belanja Uang Lembur	403,475,000	263,332,000	53.22
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	11,405,020,713	10,032,435,939	13.68
Jumlah Belanja kotor	23,160,881,639	20,005,809,069	15.77
Pengembalian Belanja Pegawai	38,595,603		-
Jumlah Belanja	23,122,286,036	20,005,809,069	15.58

B.4 Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang
Rp103.322.091.27
1,00*

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp103.322.091.271,00 dan Rp81.295.122.626,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 27,10% dari Realisasi TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	%
Belanja Barang Operasional	19,376,336,658	21,103,284,090	- 8.18
Belanja Barang Non Operasional	31,146,800,433	13,912,065,396	123.88
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,171,935,041	5,496,981,880	- 5.91
Belanja Jasa	8,245,365,954	7,466,864,399	10.43
Belanja Pemeliharaan	18,873,929,042	11,989,865,963	57.42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20,548,992,688	21,384,175,508	- 3.91
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	103,363,359,816	81,353,237,236	27.06
Pengembalian Belanja	41,268,545	58,114,610	- 28.99
Jumlah Belanja	103,322,091,271	81,295,122,626	27.10

*Realisasi Belanja
Modal
Rp164.656.928.89
0,00*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp164.656.928.890,00 dan Rp123.769.350.325,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 33,04% dibandingkan TA 2020. Kenaikan realisasi belanja modal dikarenakan pada

tahun 2021 adanya penuntasan pembangunan terminal penumpang Type A di Jatijajar dan Terminal Penumpang Type A di Pondok Cabe serta Pembangunan Prasarana Penunjang Kegiatan Pemberian Subsidi Angkutan Umum dengan skema Buy The Service di Wilayah Jabodetabek.

Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik/turun	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75,177,087,340	75,472,204,975	(295,117,635)	0.39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,052,950,100	2,027,178,000	38,025,772,100	1,875.80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	49,426,891,450	46,269,967,350	3,156,924,100	6.82
Jumlah Belanja Kotor	164,656,928,890	123,769,350,325	40,887,578,565	33.04
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	164,656,928,890	123,769,350,325	40,887,578,565	33.04

*Realisasi Belanja
Modal Tanah Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja modal tanah selama periode 31 Desember 2021 dibandingkan periode sebelumnya.

*Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp75.177.087.340,
00*

B. 5. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp75.177.087.340,00 dan Rp75.472.204.975,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 0,39 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020	Naik/turun	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.177.087.340	75.472.204.975	(295.117.635)	(0,39)
	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	75.177.087.340	75.472.204.975	(295.117.635)	(0,39)
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	75.177.087.340	75.472.204.975	(295.117.635)	(0,39)

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan
Rp6.903.990.600,0
0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.052.950.100,00 dan Rp2.027.178.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar 1.875,80% dibandingkan Realisasi TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020	Naik/turun	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.052.950.100	2.027.178.000	38.025.772.100	1.875,80
	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	40.052.950.100	2.027.178.000	38.025.772.100	1.875,80
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	40.052.950.100	2.027.178.000	38.025.772.100	1.875,80

Kenaikan belanja modal gedung dan bangunan merupakan penambahan gedung dan bangunan untuk mengembangkan gedung terminal Pondok Cabe dan Jatijajar, serta pembangunan halte portabel di Kota Bogor.

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik/turun	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-	-

Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp49.426.891.450,
00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.426.891.450,00 dan Rp46.269.967.350,00 mengalami kenaikan sebesar 6,82% dibandingkan Realisasi TA 2020.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	Naik/turun	%
Belanja Modal Lainnya	49.426.891.450	46.269.967.350	3.156.924.100	6,82
	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	49.426.891.450	46.269.967.350	3.156.924.100	6,82
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	49.426.891.450	46.269.967.350	3.156.924.100	7

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Uang Persediaan (UP)	-	-
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak dibayarkan langsung oleh pengguna jasa dengan mekanisme pembayaran melalui Aplikasi SIMPONI PNBP yang langsung terhubung dengan Bank yang ditunjuk dalam e-billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan. Sehingga Bendahara Penerimaan tidak mengelola kas tetapi hanya merekap pembayaran dari SIMPONI PNBP untuk selanjutnya dibuat laporan Realisasi Penerimaan PNBP.

*Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp,00*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara

setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar TP/TGR
Rp0,00*

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Bagian Lancar TPA Rp0,00

C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih -Piutang Jangka
Pendek Rp0,00.*

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada kualitas piutang lancar yaitu nilai piutang dikalikan dengan 0,5 persen.

Belanja Dibayar dimuka **C.8. Belanja Dibayar di Muka**
Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Persediaan
Rp3.523.404.110,00

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.523.404.110,00 dan Rp1.767.892.257,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis	NILAI T.A.2021	NILAI T.A. 2020
Barang Konsumsi	3,376,828,715	1,738,454,717
Bahan untuk Pemeliharaan	475,640	430,540
Suku Cadang	148,245,900	29,007,000
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	3,525,550,255	1,767,892,257

Tagihan TP/TGR Rp0,00

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

TPA
Rp0,00

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Panjang Rp0,00

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tanah

Rp152.859.956.635,00

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp152.859.956.635,00 dan Rp152.859.956.635,00. Tanah tersebut merupakan tanah pada 4 (empat) terminal tipe A di Wilayah Jabodetabek yang merupakan hibah dari pemerintah daerah/kota, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2021

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	19.701 m2	Terminal Poris Plawad - Kota Tangerang	21.326.665.771
2	21.415 m2	Terminal Baranangsiang - Kota Bogor	57.356.548.458
3	103.721 m2	Terminal Jatijajar - Kota Depok	66.768.167.406
4	25.995 m2	Terminal Pondok Cabe - Kota Tangerang Selatan	7.408.575.000
Jumlah			152.859.956.635

Peralatan dan Mesin

Rp300.783.665.505,0

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp300.783.665.505,00 dan Rp270.591.771.847,00. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	225,297,943,070
Mutasi tambah:	110,740,149,289
Pembelian	32,221,458,676
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	37,927,584,054
Reklasifikasi Masuk	31,527,211,654
Pengembangan Nilai Aset	1,119,660,410
Pengembangan Melalui KDP	3,788,367,000
Hibah Masuk	367,146,295
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3,788,721,200
Mutasi Kurang:	(65,446,320,512)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	(31,679,199,654)
Koreksi Pencatatan	(29,978,399,658)
Transaksi Normalisasi BMN	(3,788,721,200)
	-
Saldo per 31 Desember 2021	270,591,771,847
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(144,187,246,879)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	126,404,524,968

Dari pembelian peralatan dan mesin senilai Rp110.740.149.289,00 terdapat penambahan senilai Rp333.284.000,00 yang berasal dari belanja barang (52). Penambahan dari belanja barang terdiri dari Video Tron senilai Rp199.752.000,00 dan Rambu Petunjuk Penuntun senilai Rp133.532.000,00.

Transaksi reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar merupakan pendetailan BMN yang diperoleh melalui transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP.

Pengembangan nilai aset merupakan nilai supevisi yang dikapitalisasi ke aset definitif untuk pekerjaan fasilitas keselamatan berupa rambu, marka, traffic light dan LPJU.

Transaksi Hibah masuk merupakan perolehan hibah peralatan dan mesin berupa APPIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dari PT Marga Sarana Jabar.

Koreksi pencatatan merupakan transaksi koreksi penghapusan berupa marka jalan perolehan tahun 2021. BMN yang lakukan koreksi merupakan aset yang tidak dikategorikan aset tetap karena perolehan dibawah nilai kapitaliasi yang kurang dari Rp1.000.000,00.

Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi dan Transaksi Normalisasi adalah perlakuan secara sistem pada aplikasi SIMAK untuk menormalisasi aset karna umur aset yang melebihi masa penyusutan.

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp189.506.674.143,00 dan Rp149.304.046.043,00.

Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

*Gedung dan Bangunan
Rp189.506.674.143,00*

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	149.304.046.043
Mutasi tambah:	43.649.155.600
Pembelian	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.622.406.800
Reklasifikasi Masuk	2.708.203.000
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	36.430.543.300
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	888.002.500
Mutasi Kurang:	(3.446.527.500)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	(2.558.525.000)
Koreksi Pencatatan	-
Transaksi Normalisasi BMN	(888.002.500)
Saldo per 31 Desember 2021	189.506.674.143
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(18.581.903.043)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	170.924.771.100

Transaksi reklas masuk-reklas keluar merupakan pendetailan BMN berupa halte portabel yang berlokasi di Kota Bogor sebanyak 13 titik yang diperoleh dari KDP senilai Rp2.558.525.000,00. Dari reklas masuk senilai Rp2.708.203.000 terdapat perolehan gedung bangunan berupa kanopi yang diperoleh dari realisasi belanja peralatan dan mesin senilai Rp149.678.000,00.

Penyelesaian dengan KDP dan pengembangan melalui KDP selain merupakan transaksi perolehan berupa halte portable, juga termasuk transaksi perolehan BMN berupa lanjutan pembangunan terminal Pondok Cabe dan Jatijajar.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp27.437.061.023
00

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp27.437.061.023,00 dan Rp26.827.564.023,00.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	26,827,564,023
Mutasi tambah:	609,497,000
Pembelian	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
Reklasifikasi Masuk	
Pengembangan Nilai Aset	
Pengembangan Melalui KDP	
Transfer Masuk	609,497,000
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2021	27,437,061,023
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(15,034,418,684)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	12,402,642,339

Terdapat mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp609.497.000,00. Mutasi tambah berasal dari transfer masuk aset berupa Bangunan Halte/*Shelter* Transpakuan Bogor yang diterima dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Serah terima barang milik negara sesuai BAST Nomor BA BPTJ 37 Tahun 2021 tertanggal 27 Mei 2021.

Aset Tetap Lainnya
Rp47.148.750,00

C.17 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp47.148.750,00 dan Rp47.148.750,00. Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian (lukisan lainnya).

Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada mutasi tambah atau mutasi kurang Aset Tetap Lainnya.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan peralatan dan mesin dalam pengerjaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 telah didefinisikan menjadi aset tetap.

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021

Saldo per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	81,768,901,154
Perolehan/Penambahan KDP	18,952,241,750
Pengembangan KDP	62,816,659,404
Mutasi Kurang:	(81,768,901,154)
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(41,549,990,854)
Pengembangan Melalui KDP	(40,218,910,300)
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 30 September 2020	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
RpRp(177,803,568,606)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(Rp180.140.982.827,00) dan Rp(124.695.231.301,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 270,591,771,847	Rp (144,187,246,879)	Rp 414,779,018,726
2	Gedung dan Bangunan	Rp 189,506,674,143	Rp (18,581,903,043)	Rp 208,088,577,186
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 27,437,061,023	Rp (15,034,418,684)	Rp 42,471,479,707
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 47,148,750	-	Rp 47,148,750
	Akumulasi Penyusutan	Rp487,582,655,763	Rp(177,803,568,606)	Rp665,386,224,369

Aset Tak Berwujud
Rp137,884,362,500,00

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp137,884,362,500,00 dan Rp105.738.642.550,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	105.738.642.550
Mutasi tambah:	66.869.681.650
Pembelian	786.060.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	48.640.831.450
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	397.100.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	17.045.690.200
Mutasi Kurang:	(34.723.961.700)
Penghapusan (Penghentiaan Aset Dari Penggunaan)	(16.998.390.200)
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(17.092.990.200)
Koreksi Pencatatan	(632.581.300)
Saldo per 31 Desember 2021	137.884.362.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	4.388.612.943
Nilai Buku per 31 Desember 2021	142.272.975.443

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp(17.045.690.200,00) merupakan aset yang dihentikan dari penggunaan. Dari nilai Rp(17.045.690.200,00) telah dihapuskan senilai Rp16.998.390.200,00 dengan SK Penghapusan Nomor: SK-BPTJ 64 Tahun 2021 dan dikelompokkan ke dalam Aset Lain-lain (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan) senilai Rp47.300.000,00.

Koreksi pencatatan berupa koreksi nilai pada tabel di atas senilai Rp(632.581.300,00) berupa Software Komputer 9 NUP dan Hasil Kajian sebanyak 3 NUP. Koreksi pencatatan berupa koreksi nilai dilakukan karena kelebihan pembayaran belanja modal tahun anggaran yang lalu hasil temuan BPK RI atas LK TA 2020, atas kelebihan tersebut dilakukan setoran pengembalian sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai perolehan aset berupa pengurangan nilai barang milik negara. Rincian pengurangan nilai barang milik negara sebagai berikut:

Pengurangan Nilai ATB Berupa Software

PENGURANGAN NILAI ATB BERUPA SOFTWARE KOMPUTER DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN TEMUAN BPK TA 2020								
NO	NAMA PENYEDIA JASA	URAIAN TEMUAN	NILAI (Rp)	NAMA APLIKASI/HASIL KAJIAN	NUP	NILAI SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	NILAI PENGURANGAN (Rp)
1	CV GITA KENCANA	Kelebihan pembayaran atas kegiatan aplikasi database perlengkapan jalan	55,000,000	Aplikasi Database Perlengkapan Jalan	95	154,476,666	136,176,666	18,300,000
				Database Rest API Perlengkapan Jalan	96	163,276,666	144,976,666	18,300,000
				Aplikasi Android Viewer	97	37,876,668	19,476,668	18,400,000
2	CV GITA KENCANA	Kelebihan pembayaran atas kegiatan integrasi bus tracking sistem jalan	48,000,000	Aplikasi Bus Information Sistem Web Based + INSTAL	98	166,228,333	150,228,333	16,000,000
				Bus Tracking Monitoring Sistem Android Based	99	137,628,333	121,628,333	16,000,000
				3 API Service GPS Integrator	100	154,678,334	138,678,334	16,000,000
3	CV PHILOSOPIA	Kelebihan pembayaran atas kegiatan pengembangan aplikasi system peta interaktif informasi jaringan dan angkutan jabodetabek	61,000,000	Aplikasi Peta Interaktif	102	200,035,000	179,735,000	20,300,000
				Aplikasi Peta Interaktif Android Viewer	103	175,835,000	155,535,000	20,300,000
				API Data Integration Service	104	173,085,000	152,685,000	20,400,000
TOTAL			164,000,000					164,000,000

Pengurangan Nilai ATB Berupa Hasil Kajian

PENGURANGAN NILAI ATB BERUPA HASIL KAJIAN/PENELITIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN TEMUAN BPK TA 2020								
NO	NAMA PENYEDIA JASA	URAIAN TEMUAN	NILAI (Rp)	NAMA APLIKASI/HASIL KAJIAN	NUP	NILAI SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	NILAI PENGURANGAN (Rp)
1	VETIGA HIMAIS OPTIMA	Kelebihan pembayaran kegiatan rencana teknis modal share pelayanan angkutan barang	328,523,050	Rencana teknis modal share pelayanan angkutan barang	69	1,518,504,900	1,189,981,850	328,523,050
2	PT REKAYASA TEKNIK ARTINDO	Kelebihan pembayaran kegiatan study masterplan simpul angkutan umum di	47,250,000	Study masterplan simpul angkutan umum di wilayah jabodetabek	66	1,109,790,000	1,062,540,000	47,250,000
3	PT GAGAS TRANSCOM	Kelebihan pembayaran kegiatan rencana teknis penyusunan standar pelayanan minimal terminal barang	92,808,250	Rencana teknis penyusunan standar pelayanan minimal terminal barang	67	655,337,100	562,528,850	92,808,250
TOTAL			Rp468,581,300					468,581,300

C.21. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021

Saldo per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	44,681,899,300
Perolehan/Penambahan ATBDP	9,593,199,460
Pengembangan ATBDP	35,088,699,840
Mutasi Kurang:	(44,681,899,300)
Reklasifikasi ATBDP Menjadi Barang Jadi	(44,681,899,300)
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Aset Lain-lain Rp
165.803.000,00

C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp213.103.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2021

Saldo per 1 Januari 2021	165,803,000
Mutasi tambah:	47,300,000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	47,300,000
Mutasi Kurang:	-
	-
Saldo per 31 Desember 2021	213,103,000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	177,501,095
Nilai Buku per 31 Desember 2021	35,601,905

Mutasi tambah aset lain-lain senilai Rp47.300.000,00 merupakan Aset Tak Berwujud berupa software yang sudah tidak digunakan dalam operasional.

Rincian aset lain-lain yang tidak lagi digunakan dalam operasi entitas/pemerintah adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	KUANTITAS	RPH SATUAN	TOTAL	Keterangan
Rusak Berat				
Peralatan dan Mesin	12	Rp7,018,000	Rp84,216,000	Baggage Trolley
Peralatan dan Mesin	1	Rp3,267,000	Rp3,267,000	Kursi Besi/Metal
Peralatan dan Mesin	8	Rp1,116,500	Rp8,932,000	Alat Rumah Tangga Lainnya
Peralatan dan Mesin	9	Rp1,177,000	Rp10,593,000	Veld Bed (Alat Keamanan)
Peralatan dan Mesin	3	Rp6,765,000	Rp20,295,000	Fan
Sudah Tidak Bermanfaat				
Aset Tak Berwujud	1	Rp38,500,000	Rp38,500,000	Software Komputer - Aplikasi Survey Pejalan Kaki
Aset Tak Berwujud	1	Rp47,300,000	Rp47,300,000	Sistem Informasi Jaringan Transportasi Jabodetabek
JUMLAH			Rp213,103,000	

Aset Tak Berwujud yang sudah tidak bermanfaat senilai Rp85.800.000,00 telah diajukan penghapusan ke Biro ULP BMN dan akan dihapuskan pada TA 2022. Atas peralatan dan mesin yang rusak berat senilai total Rp127.303.000,00 akan diajukan penghapusan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPKNL Jakarta I untuk proses lelang penghapusan.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp(4.566.114.038,00)

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp(4.566.114.038,00) dan Rp(3.148.910.188). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp 137,884,362,500	Rp 4,388,612,943	Rp 133,495,749,557
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp 127,303,000	Rp 106,138,595	Rp 21,164,405
3	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 85,800,000	Rp 71,362,500	Rp 14,437,500
Akumulasi Penyusutan		Rp 138,097,465,500	Rp 4,566,114,038	Rp 133,531,351,462

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian uang muka dari KPPN sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Uang Persediaan (UP)	-	-
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**
Rp0,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pendapatan Diterima di Muka **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**
Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Ekuitas **C.27 Ekuitas**
Rp627.133.775.801,00

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp627.133.775.801,00 dan Rp534.164.854.395,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp3.306.244.500,0
0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.306.244.500,00 dan Rp4.529.521.700,00 Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 27,01%. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	Naik (turun)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	544,500	91,743,000	(91,198,500)	(99.41)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	3,305,700,000	4,429,650,000	(1,123,950,000)	(25.37)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	8,128,500	(8,128,500)	(100.00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	200	(200)	(100.00)
Jumlah	3,306,244,500	4,529,521,700	(1,223,277,200)	(27.01)

*Beban Pegawai
Rp23.122.286.036,
00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.122.286.036,00 dan Rp20.005.809.019,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2021 meningkat sebesar 15,58% dibandingkan dengan Tahun 2020. Peningkatan belanja pegawai dimaksud diakibatkan bertambahnya pegawai BPTJ sebanyak 45 orang baik berasal dari pengadaan CPNS, PKN STAN dan pola pembibitan STTD. Rincian Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Gaji Pokok PNS	7,860,645,766	6,520,485,560	1,340,160,206	20.55
Beban Pembulatan Gaji PNS	135,130	98,722	36,408	36.88
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	520,332,378	480,675,060	39,657,318	8.25
Beban Tunj. Anak PNS	146,148,774	138,201,172	7,947,602	5.75
Beban Tunj. Struktural PNS	679,380,000	725,130,000	(45,750,000)	(6.31)
Beban Tunj. Fungsional PNS	43,550,000	19,790,000	23,760,000	120.06
Beban Tunj. PPh PNS	34,190,311	35,032,386	(842,075)	(2.40)
Beban Tunj. Beras PNS	474,857,940	346,095,180	128,762,760	37.20
Beban Uang Makan PNS	1,222,859,000	1,194,178,000	28,681,000	2.40
Beban Tunjangan Umum PNS	355,500,000	250,355,000	105,145,000	42.00
Beban Uang Lembur	403,475,000	263,332,000	140,143,000	53.22
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	11,381,211,737	10,032,435,939	1,348,775,798	13.44
	-	-	-	-
Jumlah	23,122,286,036	20,005,809,019	3,116,477,017	15.58

*Beban Persediaan
Rp3.100.220.626,0
0*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.100.220.626,00 dan Rp2.485.144.762,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 22,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2020. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Persediaan konsumsi	2,986,312,546	2,437,382,762	548,929,784	22.52
Beban persediaan lainnya	113,908,080	47,762,000	-	-
Jumlah	3,100,220,626	2,485,144,762	548,929,784	22.09

*Beban Barang dan
Jasa
Rp88.593.420.903,
00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp88.593.420.903,00 dan Rp65.455.296.358,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 35,35 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan meningkatnya kebutuhan belanja barang untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Keperluan Perkantoran	16,258,867,058	19,071,743,470	(2,812,876,412)	(14.75)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	827,924,100	304,869,620	523,054,480	171.57
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	571,350,000	758,920,000	(187,570,000)	(24.72)
Beban Barang Operasional Lainnya	1,001,290,500	726,151,000	275,139,500	37.89
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	816,600,000	233,200,000	583,400,000	250.17
Beban Bahan	2,010,680,680	1,360,382,454	650,298,226	47.80
Beban Honor Output Kegiatan	371,200,000	353,750,000	17,450,000	4.93
Beban Barang Non Operasional Lainnya	55,516,219,975	33,772,883,915	21,743,336,060	64.38
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	2,917,721,436	1,366,661,100	1,551,060,336	113.49
Beban Langganan Listrik	2,487,982,284	2,077,158,291	410,823,993	19.78
Beban Langganan Telepon	10,316,646	14,564,619	(4,247,973)	(29.17)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	816,793,670	677,791,489	139,002,181	20.51
Beban Jasa Konsultan	1,757,860,500	980,600,000	777,260,500	79.26
Beban Sewa	1,663,929,554	1,099,715,000	564,214,554	51.31
Beban Jasa Profesi	1,425,983,300	2,231,380,000	(805,396,700)	(36.09)
Beban Jasa Lainnya	-	66,000,000	(66,000,000)	(100.00)
Beban Jasa Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	82,500,000	313,500,000	(231,000,000)	(73.68)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	56,201,200	46,025,400	10,175,800	22.11
	-	-	-	-
Jumlah	88,593,420,903	65,455,296,358	23,138,124,545	35.35

*Beban
Pemeliharaan
Rp19.064.384.459,
00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.064.384.459,00 dan Rp14.394.674.743,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 32,44 persen dibandingkan dengan Tahun 2020. Peningkatan beban pemeliharaan disebabkan adanya peningkatan jumlah aset dari

tahun sebelumnya yang perlu dilakukan pemeliharaan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahunan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,846,503,588	6,186,977,138	5,659,526,450	91.47
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,903,824,454	5,704,406,321	1,199,418,133	21.03
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	98,482,504	(98,482,504)	(100.00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	463,100	1,086,030	(622,930)	(57.36)
Beban Persediaan suku cadang	313,593,317	2,403,722,750	(2,090,129,433)	(86.95)
Jumlah	19,064,384,459	14,394,674,743	4,669,709,716	32.44

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp20.507.724.143,
00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20.507.724.143,00 dan Rp21.340.615.898,00.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,90 persen. Rincian beban perjalanan dinas untuk Tahunan Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Perjalanan Biasa	9,883,446,354	10,623,490,481	(740,044,127)	(6.97)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,433,971	128,669,200	(46,235,229)	(35.93)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,660,633,071	1,646,429,343	14,203,728	0.86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,881,210,747	8,942,026,874	(60,816,127)	(0.68)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah	20,507,724,143	21,340,615,898	(832,891,755)	(3.90)

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp54.644.497.234,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp54.644.497.234,00 dan Rp46.084.086.568,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.652.623.491	39.903.104.456	7.749.519.035	19,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.428.487.198	3.013.914.570	414.572.628	13,76
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.873.743.473	1.714.162.139	159.581.334	9,31
Beban Penyusutan Jaringan	4.989.666	4.989.666	-	-
Beban Amortisasi Software	1.645.466.734	1.417.795.395	227.671.339	16,06
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	9.625.000	4.812.500	4.812.500	100,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	29.561.672	25.307.842	4.253.830	16,81
Jumlah	54.644.497.234	46.084.086.568	8.560.410.666	18,58

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(1.312.000,00).

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	(1,312,000)	(1,312,000)
Jumlah	-	(1,312,000)	(1,312,000)

Beban Lain-Lain
Rp0,00

D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus/(defisit)
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp16.751.440.200,
00

D.12 SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing senilai Rp16.751.440.200,00 dan Rp580.800,00.

Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	16,751,440,200	580,800	(16,750,859,400)	-
Jumlah	16,751,440,200	580,800	(16,750,859,400)	-

Peningkatan beban kerugian pelepasan aset non lancar berasal dari penghapusan hasil kajian dan software yang sudah tidak digunakan dalam operasional senilai Rp16.998.390.200,00 dikurangi Akumulasi Amortisasi software yang tidak digunakan dalam operasional senilai Rp246.950.000,00.

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp1.203.067.270,0
0

D.13 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.203.067.270,00 dan Rp649.416.469,00.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2,408,808	100	2,408,708	2,408,708.00
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	523,077,162	299,095,935	223,981,227	74.89
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	632,581,300	153,503,555	479,077,745	312.10
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	45,000,000	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	296,410,455	(296,410,455)	(100.00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(99,593,576)	99,593,576	(100.00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	-	-	-
Jumlah	1,203,067,270	649,416,469	508,650,801	78.32

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.14 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa 31 Desember 2021 senilai Rp0,00 dan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00.

Defisit LO
Rp(193.683.689.33
5,00)

D.15 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(193.683.689.335,00) dan Rp(164.585.957.979,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
534.164.854.395,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp534.164.854.395,00 dan Rp478.925.051.694,00.

Defisit LO
Rp(221.274.661.831,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(221.274.661.831,00) dan Rp(164.585.957.979,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,00

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp(2.310.000,00)

E.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(2.310.000,00) dan Rp0,00. Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya senilai Rp2.310.000,00 berasal dari selisih reklasifikasi keluar intrakomptabel yang direklasifikasi masuk menjadi aset ekstrakomptabel.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp(550.031.110,00)

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(550.031.110,00) dan Rp0,00.

*Koreksi Lain-lain
Rp0,00*

E.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp287.358.094.055
,00*

E.7 Transaksi antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp287.358.094.055,00 dan Rp219.825.760.680,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas	Nilai	Keterangan
Ditagihkan ke Entitas Lain	291,101,306,197	Realiasi Belanja Pegawai, Barang dan Modal
Diterima dari Entitas Lain	- 4,509,311,770	Realiasi PNB
Transfer Keluar	-	
Transfer Masuk	398,953,333	Nilai Buku Transfer Masuk BMN berupa Halte
Pengesahan Hibah Langsung	367,146,295	Hibah berupa APIL
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	
Jumlah	287,358,094,055	

*Kenaikan/
Penurunan Ekuitas
Rp65.531.091.114,
00*

E.8 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp65.531.091.114,00 dan Rp55.239.802.701,00.

*Ekuitas Akhir
Rp599.695.945.509
,00*

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp599.695.945.509,00 dan Rp534.164.854.395,00.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F. 2. 1. Sertifikasi Tanah

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menerima hibah aset dari Pemerintah Daerah Kota di wilayah Jabodetabek melalui penandatanganan berita acara serah terima personil, pendanaan, prasarana dan sarana, dan dokumen (P3D). Hibah P3D tersebut berasal dari empat terminal Tipe A di Jabodetabek yaitu Terminal Baranangsiang Kota Bogor, Poris Plawad Kota Tangerang, Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan dan Jatijajar Kota Depok. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pemda Kota (Bupati/Walikota) masing-masing daerah dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub. Atas hibah tersebut BPTJ telah mencatat sebagai BMN ke dalam Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan persetujuan register hibah dari Kanwil Perbendaharaan Wilayah DKI Jakarta dan Memo Persetujuan Hibah Langsung Barang dan Jasa (MPHLBJS) dari KPPN Jakarta IV serta menginput aset dalam bentuk tanah ke dalam aplikasi SIMANTAP.

Dari Empat Lahan terminal yang diserahkan ke BPTJ satu lahan telah bersertifikat dan tiga lahan belum bersertifikat a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan. Adapun posisi aset lahan terminal sebagai berikut:

1. Lahan terminal Poris Plawad seluas 1,9 hektar, pada tahun 2020 telah masuk dalam program percepatan sertifikasi nasional (Pronas) Kanwil DJKN Banten sehingga pada tahun 2020 posisi lahan/tanah telah bersertifikat. Lahan terminal Poris Plawad bersertifikat Hak Pakai No. 00014, penerbitan sertifikat di Tangerang tanggal 12 Mei 2020;
2. Lahan terminal Baranangsiang seluas 2,1 hektar, posisi sertifikat masih atas nama Pemerintah Kota Bogor dan telah dikerjasamakan dalam bentuk BGS (Bangun Guna Serah) oleh Pemerintah Kota Bogor dengan PT PGI sampai dengan tahun 2042, saat ini BPTJ sedang proses Balik Nama Sertifikat (dari semula Pemkot Bogor ke

Pemerintah RI c.q. Kemenhub) dan proses perubahan pihak yang menandatangani BGS;

3. Lahan Terminal Pondok Cabe seluas 2,5 hektar, posisi saat ini, proses sertifikasi pada tahap pembuatan peta bidang di BPN Kota Tangerang Selatan;

4. Lahan Terminal Jatijajar, pada saat diterima, sertifikat masih atas nama perorangan (belum digabung) sebanyak 96 sertifikat dengan luas 10,3 hektar. Berdasarkan hasil pembahasan dengan BPN Kota Depok, sertifikat dipecah menjadi lima peta bidang, sehingga dilakukan perubahan KIB dari semula satu KIB menjadi lima KIB. Posisi saat ini sudah terbit empat sertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Perhubungan, sementara satu peta bidang sedang proses permohonan penerbitan SK Hak Sertifikat tanah terminal Jatijajar ke BPN Kota Depok dengan total luas lahan 17.687 m². Rincian tanah terminal Jatijajar sebagai berikut:

Nama Barang	NUP	Luas (m ²)	Jenis/No. Sertifikat	Status Sertifikat
Tanah Bangunan Terminal Darat	5	37,810	Hak Pakai No. 13	Bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kemenhub
Tanah Bangunan Terminal Darat	6	2,985	Hak Pakai No. 11	Bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kemenhub
Tanah Bangunan Terminal Darat	7	44,577	Hak Pakai No. 14	Bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kemenhub
Tanah Bangunan Terminal Darat	8	671	Hak Pakai No. 12	Bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kemenhub
Tanah Bangunan Terminal Darat	9	17,678	-	Proses Sertifikasi di BPN Kota Depok

F. 2. 2. Transfer Masuk Halte

Pada tahun anggaran 2021 BPTJ menerima transfer masuk halte dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berlokasi di Kota Bogor senilai Rp609.497.000,00 berdasarkan BAST No. BA-BPTJ 36 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021. Transfer masuk berupa halte diserahterimakan berdasarkan ADK transfer masuk berupa Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) kode barang 5.010.109.009, posisi 31 Desember 2021 masih tercatat di pencatatan BPTJ sebagaimana ADK transfer masuk. Atas halte tersebut dilakukan rehabilitasi dan difungsikan oleh BPTJ sebagai Halte Bus Transpakuan yang mulai beroperasi pada tahun 2021.

F. 2. 3. Hibah APPIL

Pada tahun anggaran 2021 BPTJ menerima hibah APPIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dari PT Marga Sarana Jabar yang berlokasi di Jalan Soleh Iskandar Bogor senilai Rp367.146.295,00 sebanyak 1 set berdasarkan BAST No. BA-BPTJ 87 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021. Atas hibah tersebut telah dibukukan pada

pencatatan BMN BPTJ berdasarkan Register Hibah No. 2X6F8TTA tanggal 15 November 2021 dan MPHBJJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang / Jasa / Surat Berharga) No. 1092992351 tanggal 31 Desember 2021.

F. 2. 4. Anggaran PC-PEN

Pada DIPA BPTJ TA 2021 terdapat anggaran PC-PEN senilai Rp80.839.103.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp79.827.273.317,00 atau sebesar 98,75 persen dari anggaran. Anggaran PC-PEN terdiri dari anggaran Penanganan Covid-19 senilai Rp4.678.720.000,00 dengan realisasi senilai Rp4.363.561.733,00 dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional senilai Rp76.160.383.000,00 dengan realisasi senilai Rp75.463.711.584,00.